

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gava Media.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Nuansa.
- Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika.
- R. Atang Ranoemiharja, *Perkembangan Hukum Agrarian Di Indonesia, Aspek-Aspek Dalam Pelaksanaan UUPA Dibidang Agrarian Di Indonesia*, Bandung.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Siswanto Sunarsono, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Grasindo Persada.
- Sucipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana.
- Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

JURNAL

- Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Vol. XI; No. I, (2017).
- Efridawati, M. Arif Nasution, "Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan", *Jurnal Administrasi Publik*, I, (Juni 2013).
- Haris Budiman, Suwari Akhmaddhian, "Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Unifikasi*. Vol. I; No.1, (Oktober 2013).

- Irsa Yonanda, Mochammad Makmur, Romula Adiono, “Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Sektor Industri Pariwisata Di Kota Batu (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. I; No. I, (2013).
- Ivan Fauzan Raharja, “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VII; No. II, (Januari 2015).
- Lukman Arief, “Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 1992 Tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di Kota Surabaya”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. VIII; No. II, (Oktober 2008).
- Nanang Suparman, “Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. XIII; No. I, (September 2017).
- Nur Masyitah Pane, Febri Yuliani, “Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan IMB”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. III; No. 1, (Maret 2012).
- Primastuti Sari Anggraeni, “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten”, *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Vol. I; No. I, (2017).
- Yudicia Pranata, Imam Hanafi, Suwodo, “Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi pada Kantor Pelayanan perijinan Terpadu Kota Batu)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. I; No. I, (2013)

SKRIPSI

- Yunus Ardiansyah, 2018, “Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Nanda Putri Mardi Utami, 2017, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Banjar

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah

Peraturan WaliKota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang “Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja”.

INTERNET

<https://kbbi.web.id/tegak> diakses pada hari Sabtu, 05 Januari 2019, pukul 21.34 WIB.

<https://dpmptsp.banjarkota.go.id/persyaratan-izin-mendirikan-bangunan-imb/> diakses pada tanggal 07 Januari 2019 pada pukul 20.27 WIB.

<https://dpmptsp.banjarkota.go.id/persyaratan-izin-peruntukan-penggunaan-tanah-ippt/> diakses pada tanggal 07 Januari 2019 pada pukul 21.45 WIB

Hestanto, *Proses dan Prosedur Perizinan*, 22 Oktober 2016, <https://www.hestanto.web.id/proses-dan-prosedur-perizinan/>, diakses pada hari Jumat, 23 Maret 2018, pukul 21.46 WIB.

Nanang Supendi, *Banyak Bangunan Tak Berizin, IMB Di Kota Banjar Diputihkan*, 22 Juli 2016, <https://www.harapanrakyat.com/2016/07/banyak-bangunan-tak-berizin-imb-di-kota-banjar-diputihkan/>, diakses pada hari Kamis, 19 April 2018, pukul 19.30 WIB.

Virida Yani, *Makalah Penegakan Hukum Indonesia*, https://www.academia.edu/12114512/Makalah_penegakan_hukum_indone

[sia ?auto=download](#), diakses pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018, pukul 01.47 WIB.